Bagian Anggaran 042

Laporan Keuangan Terakhir

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Semarang

(042.03.0300.401238.KD)

unaudited

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020

RISTEKDIKTI

Jalan Pawiyatan Luhur I/1, Bendan Dhuwur
Semarang 50233

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Utama Kementerian Riset, Teknologi/BRIN Nomor B/499/A.A3/KU.07.04/2020 tanggal 16 September 2020 LLDIKTI Wilayah VI Semarang pada Tahun Anggaran 2020 adalah salah satu entitas akuntansi eks Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang pada tahun 2020 telah berubah identitas akuntansi/pelaporannya dan tidak lagi menerima DIPA Bagian Anggaran 042 (Kementerian Riset, Teknologi/BRIN) namun tetap berkewajiban menyusun laporan keuangan hasil likuidasi Entitas Akuntasi yang berupa Laporan Keuangan Terakhir yang berisi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Terakhir LLDIKTI Wilayah VI Semarang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/ pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada LLDIKTI Wilayah VI Semarang. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Semarang, 16 Februari 2021
Kepala,

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI

Muhammad Zaenuri
NIP 196207131987031003

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
i Daftar Isi	
iii	
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Pernyataan Telah Direviu	iv
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	6
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	7
V. Catatan atas Laporan Keuangan	8
A. Penjelasan Umum	8
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	17
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	22
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	34
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	42
F. Pengungkapan Penting Lainnya	44
VI. Lampiran dan Daftar	

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH VI
Jalan Pawiyatan Luhur I / 1 Bendan Dhuwur Semarang – 50233
Telepon 024 - 8317281, 8311521 - Faksimili 024 - 8311273
Laman : http//lldikti6.ristekdikti.go.id Surel : llikti6@ristekdikti.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Terakhir LLDIKTI Wilayah VI Semarang yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 (un*audited*) sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Semarang, 16 Februari 2021
Kepala,

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI

Muhammad Zainuri
NIP 196207131987011003

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH VI
Jalan Pawiyatan Luhur I / 1 Bendan Dhuwur Semarang – 50233
Telepon 024 - 8317281, 8311521 - Faksimili 024 - 8311273
Laman : http//lldikti6.ristekdikti.go.id Surel : llikti6@ristekdikti.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR LLDIKTI WILAYAH VI TAHUN 2020 *UNAUDITED*

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Terakhir LLDIKTI Wilayah VI untuk Tahun Anggaran 2020 berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2020, Laporan Realisasi Anggaran, dan Catatan Atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah merupakan penyajian manajemen LLDIKTI Wilayah VI.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Reviu mempunyai ruang lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang bertujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan, yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas telah disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Semarang, 16 Februari 2021
Satuan Pengawas Intern,

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SATUAN PENGAWAS INTERN LLDIKTI WILAYAH VI

Agung Prasetyo
NIP 197708012009121001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2020 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2020 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.20.000.500,00 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp.0,00.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2020 adalah sebesar Rp.0,00 atau mencapai 0,00 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.0,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2020.

Nilai Aset per 31 Desember 2020 dicatat dan disajikan sebesar Rp.0,00 yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp. 0,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp. 0,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp. 0,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 0,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp.271.664.915,00 sehingga terdapat nilai Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp.271.664.915,00). Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp.20.000.500,00 dan sebesar Rp.0,00 sehingga entitas mengalami nilai deficit LO sebesar (Rp.251.664.415,00).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2020 adalah sebesar Rp.1.900.285.656,00 dikurangi Surplus/Defisit-LO sebesar (Rp.251.664.415,00) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi dan penyesuaian nilai tahun berjalan senilai Rp. 0,00 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar (Rp.1.648.621.241,00) sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2020 adalah senilai Rp.0,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2020 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LLDIKTI WILAYAH VI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	TA 2020		% thd Angg	TA 2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	0	20.0000.500	0,00	94.546
JUMLAH PENDAPATAN		**0**	**20.0000.500**	**0,00**	**94.546**
BELANJA	B.2				
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	B.2.1	0	0	0,00	0
Belanja Barang	B.2.2	0	0	0,00	5.360.484.537
Bantuan Sosial	B.2.3	0	0	0,00	0
Jumlah Belanja Operasi		**0**	**0**	**0,00**	**5.360.484.537**
Belanja Modal					
Belanja Tanah	B.2.4	0	0	0,00	0
Belanja Peralatan dan Mesin	B.2.5	0	0	0,00	1.166.602.003
Belanja Gedung dan Bangunan	B.2.6	0	0	0,00	0
Belanja Jalan, Irigasi, Jaringan	B.2.7	0	0	0,00	0
Belanja Modal Lainnya	B.2.8	0	0	0,00	0
Jumlah Belanja Modal		**0**	**0**	**0,00**	**1.166.602.003**
JUMLAH BELANJA		**0**	**0**	**0,00**	**6.540.294.000**

II. NERACA

LLDIKTI WILAYAH VI
NERACA
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(dalam Rupiah)

Uraian	Cat.	2020	2019
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	0	0
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	0	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	0	0
Piutang PNBP	C.4	0	0
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	0	0
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	0	0
Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek	C.7	0	0
Belanja Dibayar di Muka	C.8	0	0
Persediaan	C.9	0	0
Jumlah Aset Lancar		**0**	**0**
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.10	0	0
Tagihan Penjualan Angsuran	C.11	0	0
Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	C.12	0	0
Jumlah Piutang Jangka Panjang		**0**	**0**
ASET TETAP			
Tanah	C.13	0	0
Peralatan dan Mesin	C.14	0	2.994.082.621
Gedung dan Bangunan	C.15	0	0
Jalan Irigasi dan Jaringan	C.16	0	0
Aset Tetap Lainnya	C.17	0	0
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.18	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.19	0	(1.093.796.965)
Jumlah Aset Tetap		**0**	**1.900.285.656**
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.20	0	0
Aset Lain-lain	C.21	0	0
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.22	0	0
Jumlah Aset Lainnya		**0**	**0**
JUMLAH ASET		**0**	**1.900.285.656**
KEWAJIBAN			

Uraian	Cat.	2020	2019
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.23	0	0
Utang kepada Pihak Ketiga	C.24	0	0
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.25	0	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		**0**	**0**
JUMLAH KEWAJIBAN		**0**	**0**
EKUITAS			
Ekuitas	C.26	0	1.900.285.656
JUMLAH EKUITAS		**0**	**1.900.285.656**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**0**	**1.900.285.656**

III. LAPORAN OPERASIONAL

LLDIKTI WILAYAH VI
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(dalam Rupiah)

Uraian	Cat.	TA 2020	TA 2019
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Perpajakan	D.1	0	0
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.2	0	94.546
JUMLAH PENDAPATAN		**0**	**94.546**
BEBAN			
Beban Pegawai	D.3	0	0
Beban Persediaan	D.4	0	0
Beban Barang dan Jasa	D.5	0	1.380.568.503
Beban Pemeliharaan	D.6	0	0
Beban Perjalanan Dinas	D.7	0	4.042.206.037
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.8	0	0
Beban Bantuan Sosial	D.9	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.10	271.664.915	490.753.643
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.11	0	0
Beban Lain-lain	D.12	0	0
JUMLAH BEBAN		**271.664.915**	**5.913.528.183**
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		**(271.664.915)**	**(5.913.433.637)**
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	D.13	20.000.500	0
Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	D.14	0	0
Surplus/(Defisit) Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.15	0	0
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		**20.000.500**	**0**
POS LUAR BIASA	D.16		
Beban Luar Biasa		0	0
SURPLUS/DEFISIT POS LUAR BIASA		0	0
SURPLUS/DEFISIT LO		**(251.664.415)**	**(5.913.433.637)**

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

LLDIKTI WILAYAH VI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(dalam Rupiah)

Uraian	Cat.	TA 2020	TA 2019
EKUITAS AWAL	E.1	1.900.285.656	1.286.727.299
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(251.664.415)	(5.913.433.637)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN		0	0
KOREKSI YANG MENAMBAH / MENGURANGI EKUITAS			
Penyesuaian Nilai Aset	E.3	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E.4	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.5	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.6	0	0
Koreksi Lain-lain	E.7	0	0
Jumlah Koreksi yang Menambah / Mengurangi Ekuitas		**0**	**0**
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.8	**(1.648.621.241)**	**6.526.991.994**
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		**(1.900.285.656)**	**613.558.357**
EKUITAS AKHIR	E.9	**0**	**1.900.285.656**

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor LLDIKTI Wilayah VI

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis

Kantor LLDIKTI Wilayah VI Jawa Tengah, berdasarkan Permenristek Dikti nomor 15 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi , merupakan satan kerja di lingkungan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang memepunyai tugas dan fungsi di bidang peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah kerjanya yang dipimpin oleh seorang Kepala.

LLDIKTI Wilayah VI yang berlokasi di Jalan Pawiyatan Luhur I nomor 1 Bendan Dhuwur Semarang, mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah kerjanya.

Dalam mewujudkan tujuan tersebut, LLDIKTI Wilayah VI memiliki visi " *menjadi institusi yang prima dalam pelayanan pendidikan tinggi dalam rangka membentuk insan Indonesia yang cerdas komprehensif* ".

Dalam menjalankan visi tersebut, LLDIKTI Wilayah VI mempunyai 3 misi, yaitu:

1. melaksanakan regulasi dari pemerintah dalam pengawasan, pengendalian dan pemantauan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Jawa Tengah;
2. menjadi fasilitator bagi semua stakeholder pendidikan tinggi khususnya PTS dalam penguat (empower), pemberdaya (enabler), dan penyedia (provider) layanan pendidikan tinggi;
3. menyelaraskan sistem pendidikan tinggi, baik terhadap strategi nasional, pembangunan daerah, pembangunan lintas sektor dan perkembangan global.

Dalam mencapai visi dan misinya, LLDIKTI Wilayah VI menetapkan 5 sasaran strategis yang akan dicapai dalam tahun 2015-2019 yaitu:

a. terbangunnya sistem LLDIKTI Wilayah VI yang efektif dan efisien;
b. sistem penyelenggaraan Perguruan Tinggi Swasta yang otonom dan akuntabel;
c. perguruan tinggi swasta yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan pembangunan, sehingga berkontribusi terhadap peningkatan daya saing;
d. akses yang berkeadilan untuk semua lapisan masyarakat; dan
e. interaksi perguruan tinggi dengan masyarakat yang mencerminkan hubungan timbal balik yang selaras dan saling menguntungkan.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Pendekatan

Laporan Keuangan Tahun ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek

Penyusunan Laporan Keuangan

keuangan yang dikelola oleh Kantor LLDIKTI Wilayah VI. Laporan Keuangan ini dihasilkan melaui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Basis Akuntansi

Kantor LLDIKTI Wilayah VI menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor LLDIKTI Wilayah VI dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan

Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor LLDIKTI Wilayah VI. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor LLDIKTI Wilayah VI adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan-LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang

mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam peride tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
  b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
  c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai

sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

- TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat	100%

	2. Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

Penyusutan Aset Tetap

(9) Kebijakan Akuntansi atas Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  a. Tanah
  b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat tersebut tersaji pada Tabel 4.

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Implementasi Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pertama kali

(10) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas

dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis cash toward accrual direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Per tanggal 01 Januari 2020, LLDIKTI Wilayah VI Semarang telah mengalami perubahan nomenklatur Kementerian, yaitu yang semula berada pada Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Maka mulai tanggal 01 Januari 2020, LLDIKTI Wilayah VI pada BA 042.03.401238 sudah tidak mendapatkan alokasi anggaran (DIPA) yang berasal dari Direktorat Jenderal Kelembagaan, sehingga selama tahun 2020 ini LLDIKTI Wilayah VI pada BA 042.03.401238 tidak memiliki realisasi atas belanja baik belanja pegawai, belanja barang maupun belanja modal.

Uraian	2020		
	Anggaran	Realisasi	% Real. Angg.
Pendapatan :			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	20.000.500	0,00
Jumlah Pendapatan	**0**	**20.000.500**	**0,00**
Belanja :			
Belanja Pegawai	0	0	0,00
Belanja Barang	0	0	0,00
Belanja Bantuan Sosial	0	0	0,00
Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah	**0**	**0**	**0,00**

B.1. Pendapatan

Realisasi Pendapatan Rp.20.000.500,-

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.20.000.500,00 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.0,00. Pendapatan yang diterima satker LLDIKTI Wilayah VI pada tahun 2020 ini berasal dari Pendapatan dari Pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN) melalui proses lelang dengan KPKNL sesuai dengan dokumen Laporan BMN (terlampir).
Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasinya adalah sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2020		
	Anggaran	Realisasi	% Real. Angg.
1. Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	20.000.500	0,00
2. Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	0	0,00
3. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0,00
4. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0,00
5. Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	0	0,00
Jumlah	**0**	**0**	**0,00**

Realisasi pendapatan pada tahun 2020 ini berasal dari Pendapatan dari Pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN) melalui proses lelang dengan

KPKNL sesuai dengan Risalah Lelang Nomor 0279/37/2020 tanggal 26 Maret 2020. Atas pendapatan tersebut telah sepenuhnya disetor ke kas Negara pada tanggal 02 April 2020 dengan NTPN Nomor F34152G4UK9J7MNQ.

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2020 dan 2019

Uraian	Realisasi TA 2020	Realisasi TA 2019	Naik (Turun) %
1. Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	20.000.500	0	0,00
2. Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	94.546	0,00
3. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0,00
4. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0,00
5. Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	0	0,00
Jumlah	**20.000.500**	**94.546**	**0,00**

B.2. Belanja Negara

Realisasi Belanja Negara Rp.0,-

Realisasi belanja instansi pada TA 2020 adalah sebesar Rp.0,00 dikarenakan pada Tahun 2020 ini LLDIKTI Wilayah VI pada BA 042.03.401238 sudah tidak mendapat alokasi anggaran dari Direktorat Jenderal Kelembagaan. Rincian Anggaran dan realisasi belanja TA 2020 adalah sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja TA 2020

Uraian	2020		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg
Belanja Pegawai	0	0	0,00
Belanja Barang	0	0	0,00
Belanja Modal	0	0	0,00
Bantuan Sosial	0	0	0,00
Total Belanja Kotor	**0**	**0**	**0,00**
Pengembalian Belanja		0	0,00
Belanja Netto	**0**	**0**	**0,00**

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2020 dan TA 2019

Uraian	Realisasi TA 2020	Realisasi TA 2019	Naik (Turun) %
Belanja Pegawai	0	0	0,00
Belanja Barang	0	5.360.484.537	(100,00)
Belanja Modal	0	1.166.602.003	0,00
Bantuan Sosial	0	0	0,00
Jumlah total	**0**	**6.527.086.540**	**(100,00)**

Dibandingkan dengan TA 2019, realisasi belanja TA 2020 mengalami penurunan sebesar 100%, dikarenakan pada TA 2020 tidak ada realisasi anggaran yang disebabkan tidak adanya alokasi anggaran (DIPA) untuk BA 042.03.401238. Hal ini dikarenakan adanya perubahan nomenklatur Kementerian, yaitu dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

B.2.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai Rp0,00

Realisasi Belanja Pegawai TA 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2020 dan TA 2019

Uraian Jenis Belanja	Realisasi TA 2020	Realisasi TA 2019	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	0	0	0,00
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	0	0	0,00
Belanja Honorarium	0	0	0,00
Belanja Lembur	0	0	0,00
Belanja Vakasi	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	**0**	**0**	**0,00**
Pengembalian Belanja Pegawai	0	0	0,00
Jumlah Belanja Bersih	**0**	**0**	**0,00**

B.2.2 Belanja Barang

Belanja Barang Rp.0,-

Realisasi Belanja Barang TA 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.1.588.256.300,00.

Perbandingan Belanja Barang TA 2020 dan TA 2019

Uraian	Realisasi TA 2020	Realisasi TA 2019	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	0	106.560.000	(100,00)
Belanja Barang Non Operasional	0	614.718.500	(100,00)
Belanja Barang Persediaan	0	0	0,00
Belanja Jasa	0	597.000.000	(100,00)
Belanja Pemeliharaan	0	0	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0	4.042.206.037	(100,00)
Jumlah Belanja Kotor	**0**	**5.360.484.537**	**(100,00)**
Pengembalian Belanja	0	0	
Jumlah Belanja Bersih	**0**	**5.360.484.537**	**(100,00)**

Dibandingkan dengan TA 2019, realisasi belanja barang TA 2020 mengalami penurunan sebesar 100%, dikarenakan pada TA 2020 tidak ada realisasi anggaran yang disebabkan tidak adanya alokasi anggaran (DIPA) untuk BA 042.03.401238. Hal ini dikarenakan adanya perubahan nomenklatur Kementerian, yaitu dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

B.2.3 Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial Rp.0,00

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2020 dan TA 2019

Uraian Jenis Belanja	Realisasi TA	Realisasi TA	Naik

	2020	2019	(Turun) %
Belanja Bantuan Sosial	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian	0	0	0,00
Jumlah Belanja Bersih	0	0	0,00

Belanja Modal Tanah Rp.0,00

B.2.4 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2020 dan TA 2019

Uraian Jenis Belanja	Realisasi TA 2020	Realisasi TA 2019	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja Bersih	0	0	0,00

B.2.5 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 0,-

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp.0,00 dan Rp.920.512.000,00 .

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2020 dan TA 2019

Uraian Jenis Belanja	Realisasi TA 2020	Realisasi TA 2019	Naik (Turun) %
Peralatan dan Mesin	0	1.166.602.003	(100,00)
Jumlah Belanja Kotor	**0**	**1.166.602.003**	**(100,00)**
Pengembalian	0	0	0,00
Jumlah Belanja	**0**	**1.166.602.003**	**(100,00)**

Dibandingkan dengan TA 2019, realisasi belanja modal peralatan dan mesin TA 2020 mengalami penurunan sebesar 100%, dikarenakan pada TA 2020 tidak ada realisasi anggaran yang disebabkan tidak adanya alokasi anggaran (DIPA) untuk BA 042.03.401238. Hal ini dikarenakan adanya perubahan nomenklatur Kementerian, yaitu dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Belanja Modal Gedung dan

B.2.6 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal TA 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing sebesar

Bangunan Rp.0,00

Rp.0,00 dan Rp.0,00.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2020 dan TA 2019

Uraian Jenis Belanja	Realisasi TA 2020	Realisasi TA 2019	Naik (Turun) %
Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja	**0**	**0**	**0,00**

B.2.7 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rp.0,00

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2020 dan TA 2019

Uraian Jenis Belanja	Realisasi TA 2020	Realisasi TA 2019	Naik (Turun) %
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja	0	0	0,00

B.2.8 Belanja Modal Lainnya

Belanja Modal Lainnya Rp.0,00

Realisasi Belanja Modal TA 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2020 dan TA 2019

Uraian Jenis Belanja	Realisasi TA 2020	Realisasi TA 2019	Naik (Turun) %
Belanja Modal Lainnya	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal Lainnya	0	0	0,00
Jumlah Belanja	0	0	0,00

C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA

C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp.0,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut :

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

No	Keterangan	TA 2020	TA 2019
1	Saldo UP pada rekening BNI a/c 0434925570	0	0
2	Saldo UP pada brankas Bendahara Pengeluaran	0	0
3	Kuitansi UP yang belum di-SP2D-kan pada rekening BNI a/c 0434925570	0	0
	Jumlah	**0**	**0**

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerima Rp.0,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar masing-masing Rp.0,00 dan Rp.0,00. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

No	Keterangan	TA 2020	TA 2019
1	-	0	0
	Jumlah	**0**	**0**

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp.0,00

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai.

Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

Jenis	TA 2020	TA 2019
Jasa Giro uang Belum Disetor ke Kas Negara	0	0
Pajak yang Belum Disetor	0	0
Honor Kegiatan yang Belum Dibagikan	0	0
Pengembalian Belanja Belum Disetor ke Kas Negara	0	0
Dana Hibah Penelitian	0	0
Jumlah	**0**	**0**

C.4 Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak Rp.0,00

Saldo Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Piutang bukan pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan dan belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak disajikan sebagai berikut :

Rincian Piutang Bukan Pajak

Uraian	TA 2020	TA 2019
Piutang PNBP	0	0
Piutang Lainnya	0	0
Jumlah	**0**	**0**

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Bag Lancar Tagihan TP/TGR Rp.0,00

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang. Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR tersaji adalah sebagai berikut :

Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

No	Uraian	TA 2020	TA 2019
1	-	0	0
	Jumlah	**0**	**0**

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bag Lancar TPA Rp.0,00

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Bagian

Lancar TPA merupakan TPA yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Bagian Lancar TPA

No	Uraian	TA 2020	TA 2019
1	-	0	0
	Jumlah	**0**	**0**

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek Rp.0,00

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Jangka Pendek pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Jangka Pendek

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	-	-
Kurang Lancar	-	-	-
Diragukan	-	-	-
Macet	-	-	-
Jumlah	-	-	-
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	-	-
Kurang Lancar	-	-	-
Diragukan	-	-	-
Macet	-	-	-
Jumlah	-	-	-
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	-	-
Kurang Lancar	-	-	-
Diragukan	-	-	-
Macet	-	-	-
Jumlah	-	-	-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-	-	-

C.8 Belanja Dibayar di Muka

Belanja Dibayar di Muka Rp.0,00

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Belanja Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa

belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Rincian Belanja Dibayar di Muka

No	Jenis	TA 2020	TA 2019
1	Pembayaran Internet	0	0
2	Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	0	0
3	Pembayaran Sewa Gedung Kantor	0	0
	Jumlah	**0**	**0**

C.9 Persediaan

Persediaan Rp.0,00

Nilai Persediaan per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

Rincian Persediaan

Persediaan	TA 2020	TA 2019
Barang Konsumsi	0	0
Barang untuk Pemeliharaan	0	0
Bahan Baku	0	0
Persediaan Lainnya	0	0
Jumlah	**0**	**0**

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

C.10 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Tagihan TP/TGR Rp.0,00

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaianya.

Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

Rincian Tagihan TP/TGR

No	Debitur	TA 2020	TA 2019
1	-		
Jumlah			

C.11 Tagihan Penjualan Angsuran

TPA Rp.0,00

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Tagihan PA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Tagihan PA

No	Debitur	Tahun 2020	Tahun 2019
1	-		
Jumlah			

C.12 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Rp.0,00

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang TPA.

Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Jangka Panjang untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut :

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Jangka Panjang

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	-	-
Kurang Lancar	-	-	-
Diragukan	-	-	-
Macet	-	-	-
Jumlah	-	-	-
Tagihan PA			
Lancar	-	-	-

Kurang Lancar	-	-	-
Diragukan	-	-	-
Macet	-	-	-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-	-	-

C.13 Tanah

Tanah Rp.0,00

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor LLDIKTI Wilayah VI per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Mutasi nilai tanah dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	**0**
Mutasi tambah :	
	0
Mutasi kurang :	
	0
Saldo per 31 Desember 2020	**0**

C.14 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin Rp.2.994.082.621,00

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah Rp.2.994.082.621,00 dan Rp. Rp.2.994.082.621,00. Tidak terjadi perubahan nilai Peralatan dan Mesin dikarenakan tidak ada penambahan nilai peralatan dan mesin baik melalui pembelian maupun hibah. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	**2.994.082.621**
Mutasi tambah :	
Pembelian	0
Koreksi Tambah	0
Mutasi kurang :	
Transfer Keluar	2.994.082.621
Saldo per 31 Desember 2020	0
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2020	0
Nilai Buku per 31 Desember 2020	**0**

Dari jumlah Peralatan dan Mesin diatas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp.0,00. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara pada Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor B/100/A.A3/PL.02.00/2020 dan Nomor 106097/A.A2/LK/2020 tanggal 27 Oktober 2020 serta Berita Acara Likuidasi dan Migrasi Barang Milik Negara (BMN) – Aset Tetap Nomor : 727/LL6/TU/2020 tanggal 27 Oktober 2020 telah dilakukan pengalihan status Penggunaan, sehingga seluruh asset tetap pada Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional pada **BA 042.03.0300.401238.KD** menjadi menjadi **Rp.0,-** dan alih status penggunaan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan .

C.15 Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan Rp. 0,00

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah Rp.0,00 dan Rp.0,00. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	**0**
Mutasi tambah :	
Transfer masuk	0
Pengembangan Nilai Aset	0
Pengembangan KDP	0
Mutasi kurang :	
Koreksi semu hasil penilaian kembali	0
Saldo per 31 Desember 2020	0
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2020	0
Nilai Buku per 31 Desember 2020	**0**

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.16 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp.0,00

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	**0**
Mutasi tambah :	
Revaluasi Aset (Koreksi nilai tim penertiban aset)	0
Mutasi kurang :	
Koreksi semu hasil penilaian kembali	0
Saldo per 31 Desember 2020	0
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2020	0
Nilai Buku per 31 Desember 2020	**0**

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.17 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya Rp.0,00

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah Rp.0,00 dan Rp.0,00. Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	**0**
Mutasi tambah :	
Transfer Masuk	0

Mutasi kurang :	
Penghentian dari penggunaan	0
Saldo per 31 Desember 2020	0
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2020	0
Nilai Buku per 31 Desember 2020	**0**

Rincian aset tetap lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.18 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Konstriksi Dalam Pengerjaan Rp.0,00

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp. Rp.0,00.

Mutasi transaksi terhadap Konstruksi Dalam Pengerjaan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	**0**
Mutasi tambah :	
Koreksi Pencatatan	0
Mutasi kurang :	
Kapitalisasi BMN	0
Saldo per 31 Desember 2020	**0**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2020	0
Nilai Buku per 31 Desember 2020	**0**

Rincian lebih lanjut terkait Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) disajikan dalam lampiran.

C.19 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp.0,00

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing (Rp.0,00) dan (Rp.1.093.796.965,00). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Dikarenakan telah terjadi pengalihan status penggunaan asset tetap dari LLDIKTI Wilayah VI pada **BA 042.03.0300.401238.KD** ke LLDIKTI Wilayaha VI pada kode **BA 023.17.0300.677582.KD** maka seluruh akumulasi penyusutan juga telah dialihkan. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	0	0	0
3	Gedung dan Bangunan	0	0	0
4	Jalan, Irigasi & Jaringan	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	0	0	0

6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0
	Akumulasi Penyusutan	**0**	**0**	**0**

C.20 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud Rp.0,00.

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah Rp.0,00 dan Rp.0,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	0
Mutasi tambah :	
Transfer Masuk	0
Mutasi kurang :	
Reklasifikasi ke dalam Peralatan dan Mesin	0
Saldo per 31 Desember 2020	0
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2020	0
Nilai Buku per 31 Desember 2020	0

Rincian lebih lanjut terkait Aset Tak Berwujud akan disajikan dalam lampiran.

C.21 Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain Rp.0,00

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah Rp.0,00 dan Rp.0,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	**0**
Mutasi tambah :	
Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin	0
Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya	0
Mutasi kurang :	
Penghapusan BMN	0
Saldo per 31 Desember 2020	0
Akumulasi Penyusutan	0
Nilai Buku per 31 Desember 2020	**0**

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.22 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya (Rp.0,00)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing (Rp.0,00) dan (Rp.0,00). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas

dan manfaat Aset Lainnya.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud	0	0	0
Aset Lain-lain	0	0	0
Jumlah	**0**	**0**	**0**

C.23 Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN Rp. 0,-

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.24 Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga Rp.0,00

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Kantor LLDIKTI Wilayah VI per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

No	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1	Beban Langganan Telepon Yang Masih Harus Dibayar	0	
2	Beban Langganan Listrik Yang Masih Harus Dibayar	0	
3	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya Yang Masih Harus Dibayar	0	
Total		**0**	

C.25 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya Rp.0,00

Nilai Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Adapun rincian Utang Jangka Pendek Lainnya pada Kantor LLDIKTI Wilayah VI per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya

No	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1	Koreksi atas biaya konsultan	0	
2	Utang atas Pendapatan Pajak PPN yang belum disetor	0	
3	Utang atas Pendapatan Pajak PPH ps 21 yang belum disetor	0	
4	Utang atas Pendapatan Pajak PPH ps 23 yang belum disetor	0	
Total		**0**	

C.26 Ekuitas

Ekuitas

Rp.0,00

Ekuitas per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.1.900.285.656,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS- POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Perpajakan

Pendapatan Perpajakan Rp.0,00

Jumlah Pendapatan Perpajakan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Pendapatan tersebut terdiri dari :

Rincian Pendapatan Perpajakan Tahun 2020 dan 2019

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik (Turun) %
Pendapatan PPh pasal 22	0	0	0,00
Pendapatan PPh pasal 23	0	0	0,00
Pendapatan PPN Dalam Negeri	0	0	0,00
Jumlah	**0**	**0**	**0,00**

D.2. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan PNBP Rp.0,00

Jumlah Pendapatan PNBP untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp.0,00 dan Rp.94.546,00. Pendapatan yang diperoleh pada tahun 2019 adalah berasal dari Pendapatan Jasa Giro, namun pada TA 2020 Pendapatan Jasa Giro bernilai Rp.0,00 dikarenakan LLDIKTI Wilayah VI pada BA 042.03.401238 sudah tidak memiliki rekening pada Bank dan telah menjadi satker tidak aktif pada Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan telah mengalami perubahan nomenklatur.

Rincian pendapatan tersebut terdiri dari :

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun 2020 dan 2019

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik (Turun) %
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	94.546	(100,00)
Pendapatan Lain-lain	0	0	0,00
Jumlah	**0**	**94.546**	**(100,00)**

D.3. Beban Pegawai

Beban Pegawai Rp. 0,00

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai Tahun 2020 dan 2019

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik (Turun) %
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	0	0	0,00
Beban Tunjangan Pegawai Non PNS	0	0	0,00
Beban Honorarium dan Vakasi	0	0	0,00
Beban Lembur	0	0	0,00
Jumlah	**0**	**0**	**0,00**

D.4 Beban Persediaan

Beban Persediaan Rp.0,00

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Tahun 2020 dan 2019

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik (Turun) %
Beban Persediaan Konsumsi	0	0	0,00
Beban Persediaan Bahan Baku	0	0	0,00
Beban Persediaan Lainnya	0	0	0,00
Jumlah	**0**	**0**	**0,00**

D.5. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa Rp.0,00

Jumlah Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.1.380.568.503,00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/ atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2020 dan 2019

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik (Turun) %

Beban Honor Operasional Satuan Kerja	0	106.560.000	(100,00)
Beban Bahan	0	404.618.500	(100,00)
Beban Honor Output Kegiatan	0	200.200.000	(100,00)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	0	9.900.000	(100,00)
Beban Sewa	0	16.100.000	(100,00)
Beban Jasa Profesi	0	580.900.000	(100,00)
Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	0	62.290.003	(100,00)
Jumlah	**0**	**1.380.568.503**	**(100,00)**

D.6. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Rp.0,00

Beban Pemeliharaan pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Rincian beban pemeliharan pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2020 dan 2019

Uraian Jenis Beban	TA 2020	TA 2019	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	0	0
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	0	0
Beban Persediaan bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0
Jumlah	**0**	**0**	**0**

D.7. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Rp.0,00

Beban Perjalanan Dinas Tahun pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.4.042.206.037,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2020 dan 2019

Uraian Jenis Beban	TA 2020	TA 2019	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	0	290.134.019	0,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam	0	36.587.000	(100,00)

Kota			
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	825.172.500	(100,00)
Beban Perjalanan Dinas Meeting Luar Kota	0	2.890.312.518	(100,00)
Jumlah	**0**	**4.042.206.037**	**(100,00)**

D.8. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Rp.0,00

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi.

D.9. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Rp.0,00

Beban Bantuan Sosial pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

D.10. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp.271.664.915,00

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.271.664.915,00 dan Rp.490.753.643,00. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2020 dan 2019

Uraian Beban Penyusutan dan Amortisasi	TA 2020	TA 2019	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	271.664.915	490.753.643	(44.64)
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	**271.664.915**	**490.753.643**	**(44.64)**

D.11. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Rp.0,00

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

D.12. Beban Lain-lain

Jumlah Beban Lain-lain pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing

Beban Lain-lain Rp.0,00

sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

D.13. Kegiatan Non Operasional

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Rp.20.000.500,00

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

Rincian Kegiatan Non Operasional Tahun 2020 dan 2019

Uraian Jenis Beban	TA 2020	TA 2019	Naik (Turun) %
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional	20.000.500	0	0,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional	0	0	0,00
Surplus dari Kegiatan Non Operasional	**20.000.500**	**0**	**0,00**

D.14 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa Rp.0.,00

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

Rincian Pos Luar Biasa Tahun 2020 dan 2019

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik (Turun) %
Beban Luar Biasa	0	0	0,00
Jumlah	**0**	**0**	**0,00**

E. PENJELASAN ATAS POS- POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal Rp.1.900.285.656,00

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.1.900.285.656,00 dan Rp.1.286.727.299,00.

Defisit LO (Rp.251.664.415,00)

E.2. Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar (Rp.251.664.415,00) dan (Rp.5.913.433.637,00). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian Nilai Aset Rp.0,00

E.3. Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset adalah penyesuaian atas pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan . Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

Koreksi Nilai Persediaan Rp.0,00

E.4. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

Selisih Revaluasi Aset Tetap Non Revaluasi Rp.0,00

E.5. Selisih Revaluasi Aset Tetap Non Revaluasi

Selisih Revaluasi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi Rp.0,00

E.6. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing Rp.0,00 dan Rp.0,00.

Koreksi Lain-lain Rp.o,00

E.7. Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

Transaksi Antar Entitas (Rp.1.648.621.241,00)

E.8. Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar (Rp.1.648.621.241,00) dan Rp.6.526.991.994,00. Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

Rincian Transaksi Antar Entitas Tahun 2020 dan 2019

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019	Naik (Turun) %
Ditagihkan ke Entitas Lain	0	6.527.086.540	(100,00)
Diterima dari Entitas Lain	(20.000.500)	(94.546)	21.054,25
Transfer Keluar	(1.628.620.741)	0	0,00
Transfer Masuk	0	0	0,00
Jumlah	**(1.648.621.241)**	**6.526.991.994**	**(125.25)**

E.9. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir Rp.0,00

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.1.900.285.656,00.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

Beberapa kejadian penting lainnya yang terjadi pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

F.1 DIPA BA 042.01.401238

Berdasarkan PP No 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan PP No 94 Tahun 2019 Tentang Kementerian Riset dan Teknologi maka telah terjadi perubahan nomenklatur pada Kementerian Riset dan Teknologi yang menyebabkan 139 Satuan Kerja eks Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang terdiri dari 122 Satuan Kerja Perguruan Tinggi Negeri (PTN), 14 Satuan Kerja LLLDIKTI dan 3 Satuan Kerja Pusat yang melaksanakan fungsi Pendidikan Tinggi berafiliasi kembali ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hal ini menyebabkan mulai tanggal 01 Januari 2020 satker LLDIKTI Wilayah VI yang menggunakan BA 042.03.401238 menjadi satker infaktif dikarenakan sudah tidak lagi mendapat alokasi DIPA dari Direktorat Jenderal Kelembagaan sehingga tidak ada anggaran dan realisasi anggaran atas DIPA tersebut.

F.2 REKENING PEMERINTAH

Rekening pemerintah yang dimiliki oleh LLDIKTI VI dengan kode BA 042.03.0300.401238 adalah Rekening Giro pada Bank BNI Cabang UNDIP Semarang dengan nomor Rekening 0434938771 dengan atas nama BPG 026 LLDIKTI WILAYAH VI SEMARANG 03 yang dibuka dengan persetujuan Kepala KPPN Semarang I nomor : S-401/WPB.14/KP.026/2016 tanggal 26 Februari 2016.

Rekening Giro ini adalah rekening yang digunakan untuk menampung anggaran pengeluaran belanja yang berasal dari DIPA LLDIKTI Wilayah VI.

Namun dikarenakan satker LLDIKTI Wilayah VI pada BA 042.03.401238 telah menjadi satker inaktif maka melalui surat Nomor 6/LL6/PR/2020 tanggal 03 Januari 2020, LLDIKTI Wilayah VI telah melakukan penutupan rekening pada Bank BNI Cabang UNDIP Semarang dengan nomor Rekening 0434938771 dengan atas nama BPG 026 LLDIKTI WILAYAH VI SEMARANG 03 dan melalui surat Bank BNI Cabang UNDIP Semarang Nomor UDS/4/547 tanggal 05 Maret 2020 yang menyatakan bahwa per 08 Januari 2020, Rekening Giro atas nama BPG 026 LLDIKTI WILAYAH VI SEMARANG 03 telah ditutup dan dinyatakan tidak aktif dengan sisa saldo

sebesar Rp.0,00.

F.3 PENGUNGKAPAN AKRUAL

Pada satuan kerja LLDIKTI Wilayah VI dengan BA 042.03.0300.401238 per 30 Juni 2020 tidak terdapat belanja maupun pendapatan secara akrual.

F.4 PEMINDAHTANGANAN BMN

Sesuai dengan Risalah Lelang Nomor 0279/37/2020 tanggal 26 Maret 2020, LLDIKTI telah melakukan proses lelang atas beberapa Barang Milik Negara dengan kondisi rusak berat yang terdiri dari :

No	Nama Barang	Jumlah Unit
1.	Notebook	8 unit
2.	Laptop	1 unit
3.	PC unit	13 unit
4.	Overhead Projector	5 unit
5.	Printer	13 unit
6.	Mesin Ketik	3 unit
7.	UPS	15 unit
8.	Dispenser	6 unit
9.	Mesin Pemotong Rumput	1 unit
10.	Telepon PABX	1 unit
11.	Pesawat Telepon	18 unit
12.	Faximile	3 unit
13.	Mesin Ketik Listrik	1 unit
14.	Lemari Besi / Metal	8 unit
15.	Lemari Kayu	42 unit
16.	Rak Besi	14 unit
17.	Rak Kayu	17 unit
18.	Filling Cabinet Besi	19 unit
19.	Meja Kerja Kayu	16 unit
20.	Kursi Besi/Metal	233 unit
21.	Kursi Kayu	112 unit
22.	Meja Komputer	14 unit
23.	Tempat Tidur Kayu	1 unit
24.	Lambang Korpri/Dharma Wanita	4 unit
25.	Tiang bendera	87 unit
26.	Compact Disk Player	1 unit
27.	Radio	1 unit
28.	Audio Amplifier	1 unit
29.	Lemari Es	1 unit
30.	Alat Penghancur Kertas	1 unit
31.	Video Tape Recorder	1 unit
32.	Wireless Amplifier	1 unit
33.	Tape Recorder	1 unit
34.	Unit Power Supply	5 unit
35.	AC Split	8 unit
36.	Mesin Ketik Langewagon	1 unit

37.	Telephone Hibrid	1 unit
38.	Kipas Angin	9 unit
39.	Wireless	1 unit
40.	Speaker Kabaret	2 unit
41.	Alat Musik Tradisional	15 unit
42.	Disk Pack	2 unit
43.	Hard Copy Console	1 unit
44.	Hard Disk	5 unit
45.	Floppy Disk Unit	13 unit
46.	Calculator	11 unit
47.	Perkakas Kantor Lainnya	6 unit
48.	Sice	114 unit
49.	Visual/Papan Nama	8 unit
50.	White Board	21 unit
51.	Stabilisato	5 unit
52.	Handy Talky	3 unit
53.	Besi Bongkaran Tower Inheren	17 batang 50 m

Keseluruhan barang tersebut telah berhasil dilakukan lelang dengan total nilai sebesar Rp 20.000.500,00 dan seluruh nilai tersebut telah disetorkan ke Kas Negara melalui KPKNL pada tanggal 02 April 2020 dengan nomor NTPN F34152G4UK9J7MNQ (data terlampir).

F.5 PROSES ALIH STATUS PENGGUNAAN ASET TETAP (TRANSFER KELUAR ASET)

Berdasarkan pada :

1. Surat Persetujuan Alih Status Penggunaan BMN dan Pengelola Nomor S-55/MK.6/WKN.09/KNL.01/2020 tanggal 13 Oktober 2020.
2. BAST Aset Tetap dari Kemenristek/BRIN ke Kemendikbud Nomor B/100/A.A3/PL.02.00/2020 dan Nomor : 106097/A.A2/LK/2020 tertanggal 27 Oktober 2020
3. Surat Sekretaris Utama Kemenristek BRIN Nomor : B/512/A.A3/KU/07.02/2020 tertanggal 18 September 2020 tentang Pemberitahuan Pelaksanaan Likuidasi dan Migrasi Data Barang Milik Negara (BMN) Aset Tetap.
4. Berita Acara Likuidasi dan Migrasi Barang Milik Negara (BMN) – Aset Tetap Nomor : 727/LL6/TU/2020 tanggal 27 Oktober 2020.

Maka telah dilaksanakan proses Transaksi Transfer Likuidasi Aset Tetap pada Satuan Kerja LLDIKTI Wilayah VI dari kode satker **042.03.0300.401238.KD** ke Satuan Kerja LLDIKTI Wilayah VI kode

satker **023.17.0300.677582.KD** dengan perincian sebagai berikut :

No	Aset Tetap	Nilai
1.	Peralatan dan Mesin	2.994.082.621
2.	Gedung dan Bangunan	62.290.003
	Total Aset	**3.056.372.624**

Sehingga pada 31 Desember 2020 posisi asset pada BA **042.03.0300.401238.KD** adalah sebesar **Rp.0,00**.

LAMPIRAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	: 042	KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (BRIN	Kode Lap.	: LRAST
ESELON I	: 03	DIREKTORAT JENDERAL KELEMBAGAAN ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN	Tanggal	: Friday, January 22,
WILAYAH/PROPINSI	: 0300	JAWA TENGAH	Halaman	: 1
SATUAN KERJA	: 401238	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG	Prog.Id	: lu_pastkt
JENIS KEWENANGAN	: KD	KANTOR DAERAH		

No	URAIAN	2020				2019			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH								
A.I.1	PENERIMAAN NEGARA	0	20,000,500	20,000,500	0.00	0	94,546	94,546	0.00
A.I.1.a	Penerimaan Perpajakan	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
A.I.1.b	Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	20,000,500	20,000,500	0.00	0	94,546	94,546	0.00
A.I.2	HIBAH	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	0	20,000,500	20,000,500	0.00	0	94,546	94,546	0.00
B	BELANJA NEGARA								
B.I.1	Rupiah Murni	0	0	0	0.00	6,540,294,000	6,527,086,540	(13,207,460)	99.80
B.I.1.a	Belanja Pegawai	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.1.b	Belanja Barang	0	0	0	0.00	5,373,652,000	5,360,484,537	(13,167,463)	99.75
B.I.1.c	Belanja Modal	0	0	0	0.00	1,166,642,000	1,166,602,003	(39,997)	100.00
B.I.1.d	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.1.e	Subsidi	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.1.f	Hibah	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.1.g	Bantuan Sosial	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.1.h	Belanja Lain-lain	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.2	Pinjaman dan Hibah	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.2.a	Belanja Pegawai	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.2.b	Belanja Barang	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.2.c	Belanja Modal	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.2.d	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.2.e	Subsidi	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.2.f	Hibah	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.2.g	Bantuan Sosial	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.2.h	Belanja Lain-lain	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	JUMLAH BELANJA	0	0	0	0.00	6,540,294,000	6,527,086,540	(13,207,460)	99.80
C	PEMBIAYAAN								
C.I	PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C.I.1	Perbankan Dalam Negeri	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C.I.2	Non Perbankan Dalam Negeri (Neto)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C.II	PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	: 042	KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (BRIN	Kode Lap.	: LRAST
ESELON I	: 03	DIREKTORAT JENDERAL KELEMBAGAAN ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN	Tanggal	: Friday, January 22,
WILAYAH/PROPINSI	: 0300	JAWA TENGAH	Halaman	: 2
SATUAN KERJA	: 401238	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG	Prog.Id	: lu_pastkt
JENIS KEWENANGAN	: KD	KANTOR DAERAH		

No	URAIAN	2020				2019			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C.II.1	Penarikan Pinjaman Luar Negeri	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C.II.1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	JUMLAH PEMBIAYAAN	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00

Semarang, 31 Desember 2020
Kepala

Muhammad Zainuri
NIP. 196207131987031003

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 042 KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
UNIT ORGANISASI : 03 DIREKTORAT JENDERAL KELEMBAGAAN ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI, DAN
WILAYAH/PROPINSI : 0300 JAWA TENGAH
SATUAN KERJA : 401238 LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG

JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2020	2019	Jumlah	%
1	2	3	4	5
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN PERPAJAKAN				
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	0.00
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	0.00
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	0.00
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	0.00
Pendapatan Cukai	0	0	0	0.00
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	0.00
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	0.00
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	0.00
Jumlah Pendapatan Perpajakan	**0**	**0**	**0**	**0.00**
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK				
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0.00
Pendapatan Dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)	0	0	0	0.00
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	94,546	(94,546)	(100.00)
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	**0**	**94,546**	**(94,546)**	**(100.00)**
PENDAPATAN HIBAH				
Pendapatan Hibah	0	0	0	0.00
Jumlah Pendapatan Hibah	**0**	**0**	**0**	**0.00**
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	**0**	**94,546**	**(94,546)**	**(100.00)**
BEBAN OPERASIONAL				
Beban Pegawai	0	0	0	0.00
Beban Persediaan	0	0	0	0.00
Beban Barang dan Jasa	0	1,380,568,503	(1,380,568,503)	(100.00)
Beban Pemeliharaan	0	0	0	0.00
Beban Perjalanan Dinas	0	4,042,206,037	(4,042,206,037)	(100.00)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	0.00
Beban Bunga	0	0	0	0.00
Beban Subsidi	0	0	0	0.00
Beban Hibah	0	0	0	0.00
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	0.00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	271,664,915	490,753,643	(219,088,728)	(44.64)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	0.00
Beban Transfer	0	0	0	0.00
Beban Lain-Lain	0	0	0	0.00
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	**271,664,915**	**5,913,528,183**	**(5,641,863,268)**	**(95.41)**

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 042 KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
UNIT ORGANISASI : 03 DIREKTORAT JENDERAL KELEMBAGAAN ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI, DAN
WILAYAH/PROPINSI : 0300 JAWA TENGAH
SATUAN KERJA : 401238 LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG

JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2020	2019	Jumlah	%
1	2	3	4	5
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	**(271,664,915)**	**(5,913,433,637)**	**5,641,768,722**	**95.41**
KEGIATAN NON OPERASIONAL				
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR				
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	20,000,500	0	20,000,500	0.00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	0.00
Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	**20,000,500**	**0**	**20,000,500**	**0.00**
SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0.00
Jumlah Surplus/(defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	**0**	**0**	**0**	**0.00**
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA				
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	0.00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	0.00
Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	**0**	**0**	**0**	**0.00**
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	**20,000,500**	**0**	**20,000,500**	**0.00**
POS LUAR BIASA				
Beban Luar Biasa	0	0	0	0.00
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA	**0**		**0**	
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	**(251,664,415)**	**(5,913,433,637)**	**5,661,769,222**	**95.74**

Semarang, 31 Desember 2020
Kepala

Muhammad Zainuri
NIP. 196207131987031003

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: 042**	**KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL**
UNIT ORGANISASI	**: 03**	**DIREKTORAT JENDERAL KELEMBAGAAN ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI, DAN**
WILAYAH/PROPINSI	**: 0300**	**JAWA TENGAH**
SATUAN KERJA	**: 401238**	**LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG**
JENIS KEWENANGAN	**: KD**	**KANTOR DAERAH**

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	31 DESEMBER 2020	31 DESEMBER 2019	Jumlah	%
1	2	3	4	5
EKUITAS AWAL	**1,900,285,656**	**1,286,727,299**	**613,558,357**	**47.68**
SURPLUS/DEFISIT - LO	**(251,664,415)**	**(5,913,433,637)**	**5,661,769,222**	**(95.74)**
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	**0**	**0**	**0**	**0.00**
Penyesuaian Nilai Aset	0	0	0	0.00
Koreksi Nilai Persediaan	0	0	0	0.00
Koreksi Atas Reklasifikasi	0	0	0	0.00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0	0	0	0.00
Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi	0	0	0	0.00
Koreksi Lain-lain	0	0	0	0.00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	**(1,648,621,241)**	**6,526,991,994**	**(8,175,613,235)**	**(125.25)**
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	**(1,900,285,656)**	**613,558,357**	**(2,513,844,013)**	**(409.71)**
EKUITAS AKHIR	**0**	**1,900,285,656**	**(1,900,285,656)**	**(100.00)**

Semarang, 31 Desember 2020
Kepala

Muhammad Zainuri
NIP. 196207131987031003

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 042 KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
UNIT ORGANISASI : 03 DIREKTORAT JENDERAL KELEMBAGAAN ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI, DAN
WILAYAH/PROPINSI : 0300 JAWA TENGAH
SATUAN KERJA : 401238 LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG

JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2020	2019	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET TETAP				
Peralatan dan Mesin	0	2,994,082,621	(2,994,082,621)	(100.00)
Akumulasi Penyusutan	0	(1,093,796,965)	1,093,796,965	(100.00)
JUMLAH ASET TETAP	**0**	**1,900,285,656**	**(1,900,285,656)**	**(100.00)**
JUMLAH ASET	**0**	**1,900,285,656**	**(1,900,285,656)**	**(100.00)**
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	0	1,900,285,656	(1,900,285,656)	(100.00)
JUMLAH EKUITAS	**0**	**1,900,285,656**	**(1,900,285,656)**	**(100.00)**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**0**	**1,900,285,656**	**(1,900,285,656)**	**(100.00)**

Semarang, 31 Desember 2020
Kepala

Muhammad Zainuri
NIP. 196207131987031003

Semarang, 05 MAR 2020

Nomor : UDS /4/ 547
Hal : Penutupan Rekening LLDIKTI
Lamp : -

Kepada Yth
LLDIKTI WILAYAH VI SEMARANG
Jl.Pawiyatan Luhur I No.1
Bendan Duwur
Semarang

Menunjuk perihal pada pokok surat tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Surat Saudara No.6/LL6/PR/2020 tanggal 03 Januari 2020 perihal Permohonan Penutupan Rekening, dapat kami sampaikan bahwa permohonan tersebut telah kami tindak lanjuti pada tanggal 08 Januari 2020 dengan data sebagai berikut :

No	Nomor Rekening	Nama Rekening
1	0434925570	BPG 026 LLDIKTI WILAYAH VI SEMARANG 01
2	0033662808	RPL 026 KOPERTIS VI UTK PS KERJASAMA
3	0434938771	BPG 026 LLDIKTI WILAYAH VI SEMARANG 03
4	0434925592	BPG 026 LLDIKTI WILAYAH VI SEMARANG 05
5	0843833932	BPG 026 LLDIKTI WILAYAH VI SEMARANG 06

2. Atas penutupan rekening tersebut, maka rekening yang dimaksud sudah tidak dapat digunakan kembali dengan sisa saldo sebesar Rp.0,- (Nol Rupiah).

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Kantor Cabang UNDIP Semarang

Yuddy Setiadi
Pemimpin Bidang Pembinaan Pelayanan

cc. KPPN Semarang I

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Kantor Cabang UNDIP
Jl. Imam Bardjo, SH No. 1
Semarang - 50241
www.bni.co.id

Scanned by TapScanner

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH VI
Jalan Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Dhuwur Semarang 50233
Telepon (024) 8317281, 8311521
Laman: http://lldikti6.ristekdikti.go.id

Nomor : 20/LL6/PR/2020 09 Januari 2020
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Laporan Penutupan Rekening

Yth. Kepala KPPN Semarang I
Di
Semarang

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja lingkup Kementerian Negara/ Lembaga dan Surat Saudara Nomor : S-401/WPB.14/KP.026/2016 tanggal 26 Februari 2016 dengan ini kami laporkan bahwa Rekening :

Nomor	: 0434938771
Nama Rekening	: BPG 026 LLDIKTI WILAYAH VI SEMARANG 03
Bank	: PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO) TBK. – CABANG UNDIP SEMARANG

Telah ditutup pada tanggal 08 Januari 2020, dengan sisa saldo Rp.0,- (Nol Rupiah)

Demikian disampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kuasa Pengguna Anggaran,

Dwi Yuwono Puji Sugiharto
NIP 19611201 198601 1001

Tembusan :
Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG MILIK NEGARA
PADA KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
KEPADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR: B/100/A.A3/PL.02.00/2020
NOMOR: 106097/A.A2/LK/2020

Pada hari ini, tanggal dua puluh tujuh bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh (27-10-2020), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Mego Pinandito
   NIP : 196710141987011002
   Jabatan : Plt. Sekretaris Kementerian Riset dan Teknologi/
   Sekretaris Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional
   Alamat : Gedung B. J. Habibie Lantai 23
   Jalan M. H. Thamrin Nomor 8, Jakarta Pusat 10340
   dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA;

2. Nama : Ainun Na'im
   NIP : 196012041986011001
   Jabatan : Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
   Alamat : Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
   dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

Berdasarkan:
1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana diubah yang terakhir dengan PMK Nomor 76/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara.
3. Surat Plt. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta Nomor: S-30/MK.06/WKN.08/KNL.04/2020 tanggal 22 Oktober 2020 hal Persetujuan Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional c.q. Universitas Singaperbangsa Karawang kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan c.q. Universitas Singaperbangsa Karawang.
4. Surat Plt. Kepala KPKNL Purwakarta Nomor: S-28/MK.06/WKN.08/KNL.01/2020 tanggal 7 Oktober 2020 hal Persetujuan Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional c.q. Politeknik Negeri Subang kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan c.q. Politeknik Negeri Subang.
5. Surat Kepala KPKNL Semarang Nomor: S-156/MK.6/WKN.09/KNL.01/2020 tanggal 14 Oktober 2020 hal Persetujuan Alih Status Penggunaan BMN pada Kemenristekdikti/BRIN kepada Kemendikbud cq. Universitas Tidar.
6. Surat Kepala KPKNL Semarang Nomor: S-155/MK.6/WKN.09/KNL.01/2020 tanggal 13 Oktober 2020 hal Persetujuan Alih Status Penggunaan BMN pada Kementerian Ristekdikti/BRIN kepada Kemendikbud cq. LLDIKTI Wilayah VI.
7. Surat Kepala KPKNL Sorong Nomor: S-44/MK.6/WKN.17/KNL.03/2020 tanggal 27 Oktober 2020 hal Persetujuan Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan c.q. Politeknik Negeri Fakfak.

8. Surat Plh. Kepala KPKNL Malang Nomor: S-114/MK.6/WKN.10/KNL.03/2020 tanggal 14 Oktober 2020 hal Persetujuan Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
9. Surat Kepala KPKNL Denpasar Nomor: 248/KM.6/WKN.14/KNL.01/2020 tanggal 14 Oktober 2020 hal Persetujuan Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
10. Surat Kepala KPKNL Denpasar Nomor: 244/KM.6/WKN.14/KNL.01/2020 tanggal 12 Oktober 2020 hal Persetujuan Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
11. Surat Kepala KPKNL Mataram Nomor: S-60/MK.6/WKN.14/KNL.03/2020 tanggal 6 Oktober 2020 hal Persetujuan Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
12. Surat Kepala KPKNL Denpasar Nomor: 239/KM.6/WKN.14/KNL.01/2020 tanggal 9 Oktober 2020 hal Persetujuan Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
13. Surat Kepala KPKNL Denpasar Nomor: 240/KM.6/WKN.14/KNL.01/2020 tanggal 9 Oktober 2020 hal Persetujuan Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
14. Surat Kepala KPKNL Surabaya Nomor: S-169/MK.6/WKN.10/KNL.01/2020 tanggal 13 Oktober 2020 hal Persetujuan Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara berupa Tanah dan/atau Bangunan pada Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
15. Surat Kepala KPKNL Surabaya Nomor: S-170/MK.6/WKN.10/KNL.01/2020 tanggal 13 Oktober 2020 hal Persetujuan Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara berupa Selain Tanah dan/atau Bangunan pada Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
16. Surat Kepala KPKNL Pangkalpinang Nomor: S-39/MK.6/WKN.04/KNL.04/2020 tanggal 13 Oktober 2020 hal Persetujuan Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
17. Surat Plh. Kepala KPKNL Tarakan Nomor: S-27/MK.6/WKN.13/KNL.04/2020 tanggal 7 Oktober 2020 hal Persetujuan Alih Status BMN pada Kementerian Riset dan Teknologi/BRIN Republik Indonesia.
18. Surat Kepala KPKNL Pangkalpinang Nomor: S-38/MK.6/WKN.04/KNL.04/2020 tanggal 13 Oktober 2020 hal Persetujuan Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
19. Surat Kepala KPKNL Samarinda Nomor: S-054/MK.6/WKN.13/KNL.02/2020 tanggal 12 Oktober 2020 hal Persetujuan Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melakukan Serah Terima Barang Milik Negara (BMN) dengan nilai perolehan senilai Rp21.883.636.694.717 (dua puluh satu triliun delapan ratus delapan puluh tiga miliar enam ratus tiga puluh enam juta enam ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah) berupa Aset Tetap, Aset Tetap Lainnya, dan Aset Lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara Serah Terima (BAST) ini dengan ketentuan sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA menyerahkan BMN senilai senilai Rp21.883.636.694.717 (dua puluh satu triliun delapan ratus delapan puluh tiga miliar enam ratus tiga puluh enam juta enam ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran BAST ini kepada PIHAK KEDUA untuk digunakan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
2. PIHAK KEDUA wajib melakukan penatausahaan BMN sebagaimana tersebut pada angka 1 sebagai BMN Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. PIHAK KEDUA wajib melakukan pengamanan dan pengelolaan BMN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian BAST ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal BAST ini dalam rangkap dua di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,	PIHAK KEDUA,
Mego Pinandito	Ainun Na’im
NIP 196710141987011002	NIP 196012041986011001

Alur	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
Disetujui	Kemal Prihatman	Kepala Biro Keuangan dan Umum		
Diperiksa	Hendra Wijaya	Kepala Bagian Rumah Tangga dan BMN		
Dikonsep	Ririn Sundary	Analis Kebijakan BMN		

Lampiran Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara
Nomor : B/100/A.A3/PL.02.00/2020
106097/A.A2/LK/2020
Tanggal : 27 Oktober 2020

Daftar Surat Persetujuan Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Negara

DIPA	Satuan Kerja	Nilai Pengajuan ASP	KPKNL	Nomor Surat	Tanggal Surat	Nilai Persetujuan ASP	Nilai BAST	Selisih	Keterangan
01	**SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN DIKTI**								
1	UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA	288.683.642.862	Purwakarta	S-30/MK.06/WKN.08/KNL.04/2020	22 Oktober 2020	288.683.642.862	288.683.642.862	0	
2	POLITEKNIK NEGERI SUBANG	242.105.459.400	Purwakarta	S-28/MK.06/WKN.08/KNL.01/2020	7 Oktober 2020	242.105.459.400	242.105.459.400	0	
3	UNIVERSITAS TIDAR	366.418.056.046	Semarang	S-156/MK.6/WKN.09/KNL.01/2020	14 Oktober 2020	366.418.056.046	366.418.056.046	0	
4	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG	117.555.818.373	Semarang	S-155/MK.6/WKN.09/KNL.01/2020	13 Oktober 2020	117.555.818.373	117.555.818.373	0	
5	POLITEKNIK NEGERI FAKFAK	194.752.836.840	Sorong	S-44/MK.6/WKN.17/KNL.03/2020	27 Oktober 2020	194.752.836.840	194.752.836.840	0	
6	UNIVERSITAS NEGERI MALANG	5.457.703.523.187	Malang	S-114/MK.6/WKN.10/KNL.03/2020 14	14 Oktober 2020	5.461.812.690.637	5.461.812.690.637	-4.109.167.450	Yang sesuai Laporan Keuangan TA 2019 Audited adalah Nilai Persetujuan ASP dan BAST. Nilai usulan ASP dari Kemenristek/BRIN kurang akun Software
7	UNIVERSITAS UDAYANA	10.371.039.474.265	Denpasar	248/KM.6/WKN.14/KNL.01/2020	14 Oktober 2020	10.371.039.474.265	10.371.039.474.265	0	
8	INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR	639.794.556.325	Denpasar	244/KM.6/WKN.14/KNL.01/2020	12 Oktober 2020	639.794.556.325	639.794.556.325	0	
9	UNIVERSITAS MATARAM	2.304.919.207.628	Mataram	S-60/MK.6/WKN.14/KNL.03/2020	6 Oktober 2020	2.304.919.207.628	2.304.919.207.628	0	
10	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VIII DENPASAR	49.878.151.816	Denpasar	239/KM.6/WKN.14/KNL.01/2020	9 Oktober 2020	49.878.151.816	49.878.151.816	0	
11	POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA	958.192.691.414	Surabaya	S-170/MK.6/WKN.10/KNL.01/2020	13 Oktober 2020	262.462.126.488	262.462.126.488	0	

DIPA	Satuan Kerja	Nilai Pengajuan ASP	KPKNL	Nomor Surat	Tanggal Surat	Nilai Persetujuan ASP	Nilai BAST	Selisih	Keterangan
				S-169/MK.6/WKN.10/KNL.01/2020	13 Oktober 2020	695.730.564.926	695.730.564.926		
12	UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG	342.464.302.589	Pangkal Pinang	S-39/MK.6/WKN.04/KNL.04/2020	13 Oktober 2020	342.464.302.589	342.464.302.589	0	
13	UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN	207.084.265.860	Tarakan	S-27/MK.6/WKN.13/KNL.04/2020	7 Oktober 2020	207.084.265.860	207.084.265.860	0	
14	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	254.281.746.302	Pangkal Pinang	S-38/MK.6/WKN.04/KNL.04/2020	13 Oktober 2020	254.276.556.416	254.276.556.416	5.189.886	Terdapat BMN yang sudah dihapuskan (ada persetujuan KPKNL dan SK Penghapusan)
TOTAL DIPA 01		**21.794.873.732.907**				**21.798.977.710.471**	**21.798.977.710.471**	**-4.103.977.564**	
03	**DIREKTORAT JENDERAL KELEMBAGAAN IPTEK DAN DIKTI**								
1	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG	3.056.372.624	Semarang	S-155/MK.6/WKN.09/KNL.01/2020	13 Oktober 2020	3.056.372.624	3.056.372.624	0	
2	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VIII DENPASAR	1.825.110.399	Denpasar	240/KM.6/WKN.14/KNL.01/2020	9 Oktober 2020	1.825.110.399	1.825.110.399	0	
3	POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA	29.505.816.734	Surabaya	S-170/MK.6/WKN.10/KNL.01/2020	13 Oktober 2020	29.505.816.734	29.505.816.734	0	
	TOTAL DIPA 03	**34.387.299.757**				**34.387.299.757**	**34.387.299.757**	**0**	
04	**DIREKTORAT JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN**								
1	POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA	17.545.959.677	Surabaya	S-170/MK.6/WKN.10/KNL.01/2020	13 Oktober 2020	17.545.959.677	17.545.959.677	0	
	TOTAL DIPA 04	**17.545.959.677**				**17.545.959.677**	**17.545.959.677**		
05	**DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA IPTEK DAN DIKTI**								
1	POLITEKNIK NEGERI SUBANG	3.185.305.450	Purwakarta	S-28/MK.06/WKN.08/KNL.01/2020	7 Oktober 2020	3.185.305.450	3.185.305.450	0	
2	POLITEKNIK NEGERI FAKFAK	18.662.840.000	Sorong	S-44/MK.6/WKN.17/KNL.03/2020	27 Oktober 2020	18.662.840.000	18.662.840.000	0	
3	UNIVERSITAS MULAWARMAN	618.354.972	Samarinda	S-054/MK.6/WKN.13/KNL.02/2020	12 Oktober 2020	618.354.972	618.354.972	0	
4	UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN	10.259.224.390	Tarakan	S-27/MK.6/WKN.13/KNL.04/2020	7 Oktober 2020	10.259.224.390	10.259.224.390	0	
	TOTAL DIPA 05	**32.725.724.812**				**32.725.724.812**	**32.725.724.812**	**0**	

DIPA	Satuan Kerja	Nilai Pengajuan ASP	KPKNL	Nomor Surat	Tanggal Surat	Nilai Persetujuan ASP	Nilai BAST	Selisih	Keterangan
TOTAL		**21.879.532.717.153**				**21.883.636.694.717**	**21.883.636.694.717**	**-4.103.977.564**	

PIHAK PERTAMA

MEGO PINANDITO
NIP 196710141987011002

PIHAK KEDUA

AINUN NA'IM
NIP 196012041986011001

Alur	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
Disetujui	Kemal Prihatman	Kepala Biro Keuangan dan		
Diperiksa	Hendra Wijaya	Kepala Bagian Rumah Tangga dan BMN		
Dikonsep	Ririn Sundary	Analis Kebijakan BMN		

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH VI
Jalan Pawiyatan Luhur I / 1 Bendan Dhuwur Semarang 50233
Telepon (024) 8317281, 8311521
Laman www.lldikti6.id

BERITA ACARA LIKUIDASI DAN MIGRASI
BARANG MILIK NEGARA (BMN) - Aset Tetap
Nomor : 727/LL6/TU/2020

Pada hari ini, Selasa tanggal 27 bulan Oktober tahun 2020 berdasarkan :

1. Surat Persetujuan Alih Status Penggunaan BMN dari Pengelola nomor : S-55/MK.6/WKN.09/KNL.01/2020 tertanggal 13 Oktober 2020
2. BAST-Aset Tetap dari Kemenristek/BRIN ke Kemendikbud Nomor : B/100/A.A3/PL.02.00/2020 dan Nomor : 106097/A.A2/LK/2020 tertanggal 27 Oktober 2020
3. Surat Sekretaris Utama Kemenristek/BRIN Nomor: B/512/A.A3/KU.07.02/2020 tertanggal 18 September 2020 tentang Pemberitahuan Pelaksanaan Likuidasi dan Migrasi data Barang Milik Negara (BMN) Aset Tetap,

Telah dilaksanakan Transaksi Transfer Likuidasi Aset Tetap pada Satuan Kerja LLDIKTI Wilayah VI dari Kode Satker : **042.03.0300.401238.KD** ke Satuan Kerja LLDIKTI Wilayah VI Kode Satker : **023.17.0300.677582.KD**
dengan hasil sebagai berikut :

1. Barang Milik Negara BA.042 TA.2019 Audited sebelum Likuidasi/Migrasi Rp. 3.056.372.624,00
2. Barang Milik Negara BA.023 SMT.I TA.2020 sebelum Transfer Masuk Rp. 0,00
3. Posisi Barang Milik Negara BA.042 TA.2020 sesuai tanggal dan bulan pelaksanan likuidasi dan migrasi ke BA 023 TA.2020 sebesar Rp. 0,- (Nihil)
4. Posisi Barang Milik Negara BA.023 TA.2020 sesuai tanggal dan bulan pelaksanan likuidasi dan migrasi (BA.042+BA.023) sebesar Rp 3.056.372.624,0000 (Rincian per akun berdasarkan Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel)
   Dengan rincian sbb:
   - Peralatan dan Mesin..... Rp. 3.056.372.624,00

Dalam pelaksanaan Likuidasi dan Migrasi data Barang Milik Negara tidak ada Barang Milik Negara yang tertinggal.

Demikian Berita Acara Likuidasi dan Migrasi Barang Milik Negara (BMN) Aset Tetap ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaiman mestinya.

Kuasa Pengguna Barang

Dr. Lukman, S.T., M.Hum.
NIP 197805112003121002

Tim Teknis:

1. Sartono, S.E. .....
2. Rina Hapsari, S.Kom .....
3. Suto Sugiraharjo, A.Md. .....